



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN

***KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH***

(LKjIP)

TAHUN
2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu pula merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala Bappeda Prov. Kaltim dengan Gubernur Kalimantan Timur.

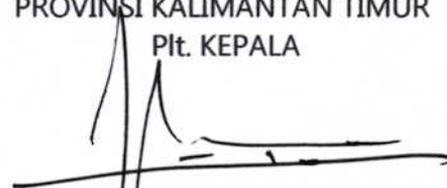
LKjIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 merupakan sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019.

Samarinda, Februari 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Plt. KEPALA



Drs. IMAN HIDAYAT, M.Si

NIP. 19620724 198603 1 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi/perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi tentang realisasi dan capaian kinerja tahun 2019. Peningkatan atau penurunan realisasi kinerja suatu instansi dapat dilihat dengan membandingkan antara : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan realisasi tahun sebelumnya, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya, tingkat kemajuan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah pada Renstra 2019-2023 serta Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Dengan demikian tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing Misi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada misi ke-5 (lima) dari misi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

“ Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,

Profesional dan Berorientasi Publik ”. Adapun Tujuan Bappeda Prov. Kaltim

seperti yang tercantum dalam Renstra Bappeda 2019 - 2023, yaitu :

“ Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”

Dokumen LKjIP Bappeda Prov. Kaltim merupakan bentuk pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim. Sasaran dan indikator kinerja terdapat pula dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang pada Renstra 2019-2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Selanjutnya pada RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim 2019-2023 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja dan beberapa tabel perhitungan lainnya sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, sebagaimana pada tabel berikut :

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

TUJUAN/ SASARAN STRATEGI	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi	77.5%	76.55	
Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	43.33%	49.80%
Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	83%	97.65%
Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	80%	126.98%

1. Perbandingan Indikator Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	43.33%	49.80%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	83%	97.65%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	80%	126.98%

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan /Penurunan
			2019	Tahun 2019
1	2	3	4	7 = (6-5) / 5*100%
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	43.33%	43.33%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	83%	83.00%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80.00%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	96%	43.33%	45.14%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	100%	83%	83.00%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80%	100.00%

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1	2	3	%	%	Tingkat efisiensi
			CAPAIAN KINERJA (> 100%)	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	49.80%	98.66%	-48.85%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	97.65%	97.71%	-0.06%
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	100%	95.22%	4.78%

CAPAIAN PADA SETIAP INDIKATOR KINERJA

1. Realisasi dari Indikator Kinerja "Persentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" dengan menyandingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dan diperoleh 26 Program yang sinergis dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dari 60 program yang dilaksanakan pada tahun 2019.
2. Realisasi diperoleh dengan menyandingkan dokumen perencanaan RENSTRA /RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan dokumen perencanaan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota, maka diperoleh capaian konsistensi kegiatan antara RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota terhadap RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan realisasi sebesar 83% konsistensi Kegiatan.
3. Realisasi indikator kinerja "Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data" di peroleh dengan melakukan perhitungan terhadap Realisasi penggunaan data-data yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya ; SIDATA dengan realisasi 83%; SIPD dengan realisasi 37% ; TEPR

dengan realisasi 100%; SIPPD dengan realisasi 100%; dari data pendukung diperoleh realisasi sebesar 80%.

PERSENTASE PENINGKATAN /PENURUNAN

Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sama dengan realisasi setiap Indikator Kinerja tahun 2019 atau dengan kata lain tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini dikarenakan karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2014-2018 sebelumnya

TINGKAT KEMAJUAN

Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan.

1. Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, nasional dan Kabupaten Kota, memiliki tingkat kemajuan 45.14%.
2. Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, memiliki tingkat kemajuan 83%.
3. Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, memiliki tingkat kemajuan 100%.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Proporsi rencana Program Pengembangan Daerah dan Sinergi Antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebesar 48.85%.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien 0.06%.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data" dimana tingkat efisiensi adalah efisien sebesar 4.78%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	I-1
B. Kedudukan, Tugas Pokon dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim	I-2
C. Struktur Organisasi	I-4
D. Sumber Daya Aparatur.....	I-5
E. Aspek Strategis Bappeda Prov. Kaltim	I-10
F. Permasalahan Utama.....	I-11
G. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Prov. Kaltim	I-13
H. Sistematika Penyajian	I-14
BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA	II-1
A. Perencanaan Strategis 2019-2023	II-1
B. Indikator Kinerja Utama.....	II-7
C. Perjanjian Kinerja.....	II-9
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun 2019	III-1
1) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....	III-1
2) Rekomendasi	III-1

B. Capaian Kinerja BAPPEDA PROV. KALTIM Tahun 2019.....	III-3
C. Analisis Capaian Kinerja	III-6
Sasaran 1. Konsistensi Perencanaan Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	III-6
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.....	III-6
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-6
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-7
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-7
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	III-9
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-44
Sasaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-45
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018..	III-45
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-45
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-45
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja	III-46
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	III-48
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-49

Sasaran 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.....	III-51
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019..	III-51
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-51
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-51
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja.....	III-52
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	III-54
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-55
D. Realisasi Anggaran	
1) Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja.....	III-56
2) Realisasi anggaran per program dan kegiatan	III-57
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur	I-6
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	I-9
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	I-13
Tabel II.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim BAPPEDA Prov. Kaltim.....	II-4
Tabel II.2.	Program /Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran.....	II-5
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama.....	II-8
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	II-9
Tabel II.5.	Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019.....	II-10
Tabel II.6	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategi	II-11
Tabel II.7	Rencana Kerja Tahunan Berdasar DPA Tahun 2018.....	II-11
Tabel III.1	Hasil Evaluasi pada Implementasi SAKIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019	III-1
Tabel III.2	Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi	III-1
Tabel III.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-4
Tabel III.4	Target dan Capaian Kinerja Organisasi.....	III-4
Sasaran 1.	Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	
Tabel III.5	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019	III-6
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	III-6
Tabel III.7	Perbandingan realisas kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA Tahun 2019-2023	III-7
Tabel III.8	Efisiensi penggunaan sumber daya	III-44
Sasaran 2.	Terkendalinya Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel III.9	Perbandingan antra target dan realisasi kinerja tahun 2019.....	III-45
Tabel III.10	Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	III-45

Tabel III.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA Tahun 2019-2023	III-46
Tabel III.12	Efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-49
Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas data dan Informasi Pembangunna Daerah		
Tabel III.13	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019	III-51
Tabel III.14	Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	III-51
Tabel III.15	Perbandingan realisais kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA Tahun 2019-2023	III-52
Tabel III.16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-55
Tabel III.17	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	III-56
Tabel III.18	Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019	III-58
Tabel III.19	Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019	III-58

DAFTAR TABEL

Gambar I.1	Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan	I-5
Gambar 1.2	Pejabat Struktural Berdasar Gender BAPPEDA Prov. Kaltim	I-6
Gambar 1.3	Staf ASN dan Tenaga Honorer/PTT Berdasar Gender Bappeda Prov. Kaltim	I-7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	I-8
Gambar I.5	Porsentase Jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan	I-9

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 yang diperbaharui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebelum ditetapkan kedua ketentuan tersebut telah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud dari pada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan No. 161 Tahun 1974.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur nomor 76 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Peran Bappeda dalam mendorong pembangunan dengan menitik beratkan pada upaya memantapkan stabilitas ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyetarakan laju pertumbuhan dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, pembangunan hukum yang terus diupayakan melalui penerangan, politik, hankam dan administrasi negara, kerjasama luar negeri yang mempunyai manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, pembiayaan dan pengendalian pembangunan dan sebagai pusat data informasi perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, maka berdasar pada peraturan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan kedudukannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam pelaksanaan Kepala Badan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang rencana, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan
2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

6. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

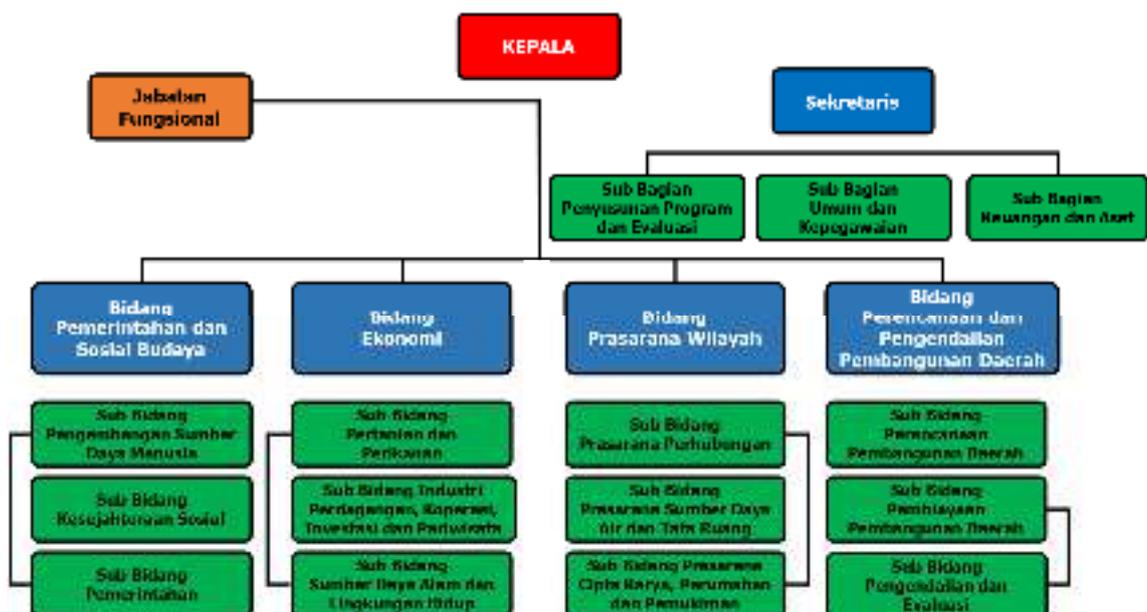
Dikarenakan masih ada penyesuaian keselarasan terkait nomenklatur jabatan yang masih dalam proses penyempurnaan antara Pusat dan Daerah maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada lempiran 1; Tanggal 21 Desember 2016 yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi. Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dipimpin oleh Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial, Sub. Bidang Pemerintahan;

4. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata, Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Prasarana Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Sub Bidang Prasana Sumberdaya Air & Tata Ruang, Sub Bidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman;
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

**Gambar I.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



D. SUMBER DAYA APARATUR

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sampai dengan data Desember 2019, Jumlah pegawai yang bekerja BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 108 (seratus delapan) orang Tenaga PNS, 69 (Enam Puluh Sembilan) orang Pegawai Non PNS dan diantara 69 orang 15 (lima belas) orang merupakan tenaga sekuriti, Sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bappeda sejumlah 177 orang.

Tabel 1. 1
Jumlah Sumber Daya Aparatur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Kepala Badan	1											
Sekretaris	1		1				1					
Ka. Bidang	3	1	4				3	1				
Ka.subbag	3			3				3				
Kasubbid	9	5	6	8			10	4				
staf	50	29	1	42	33	3	9	30	3	35	2	
Jumlah PNS	66	35	12	53	33	3	23	38	3	35	2	0
Jumlah Pegawai Non PNS	57	17					3	34	2	30	2	2
Jumlah PNS + Pegawai Non PNS	123	52	12	53	33	3	26	72	5	65	4	2

Pejabat Struktural

Pejabat - Pejabat Struktural di BAPPEDA Prov. Kaltim untuk Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan untuk Eselon IV terdiri dari 5 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Dari Tabel 1.1 Jumlah Sumberdaya

Aparatur dapat menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA Prov. Kaltim.

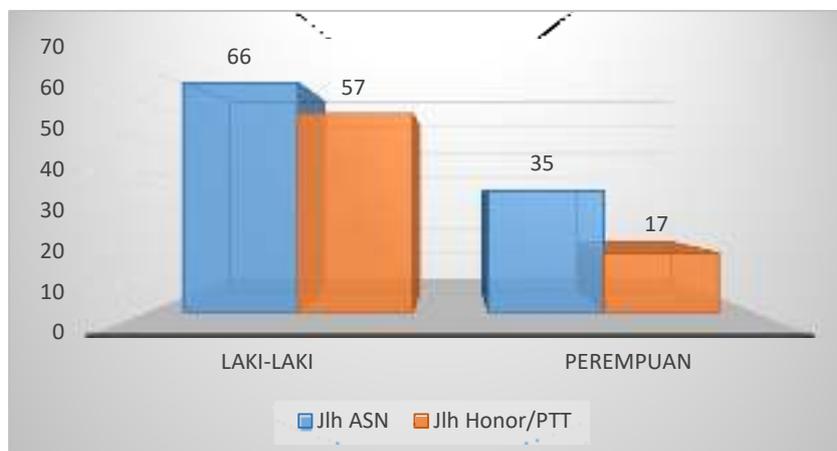
**Gambar I.2
Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasar Gender**



PNS dan Pegawai Non PNS

Staf PNS Perempuan berjumlah 35 dan staf PNS laki-laki berjumlah 66. Pegawai Non PNS perempuan berjumlah 17 dan Pegawai Non PNS laki-laki berjumlah 57. Dari Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur dapat menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam kualitas pekerjaan di BAPPEDA Prov. Kaltim.

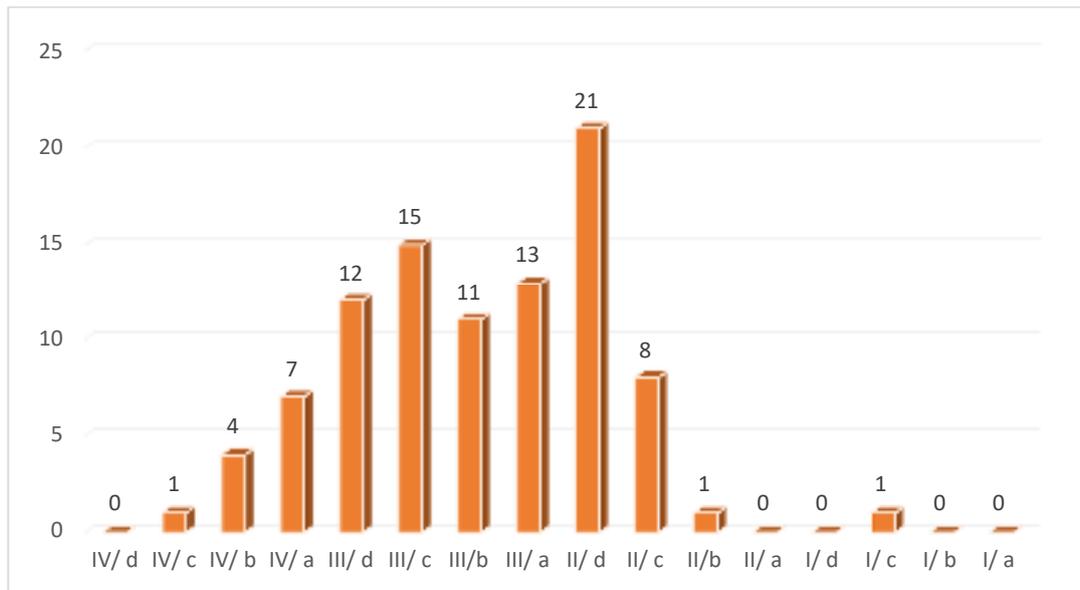
**Gambar 1.3
Staf PNS dan Pegawai Non PNS Berdasar Gender
Bappeda Prov. Kaltim**



Secara rinci jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Gambar I.4

Gambar I.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat



Berdasarkan Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Bappeda Prov.Kaltim terhadap Pangkat IV/ d sejumlah 0 orang, IV/c 1 Orang, IV/b sejumlah 4 orang, IV/a sejumlah 7 orang, III/d sejumlah 12 Orang, III/c sejumlah 15 orang, III/b sejumlah 11 orang, III/a sejumlah 13 orang, II/d sejumlah 21 orang, II/c sejumlah 8 orang, II/b sejumlah 1 orang, I/c sebanyak 1 orang.

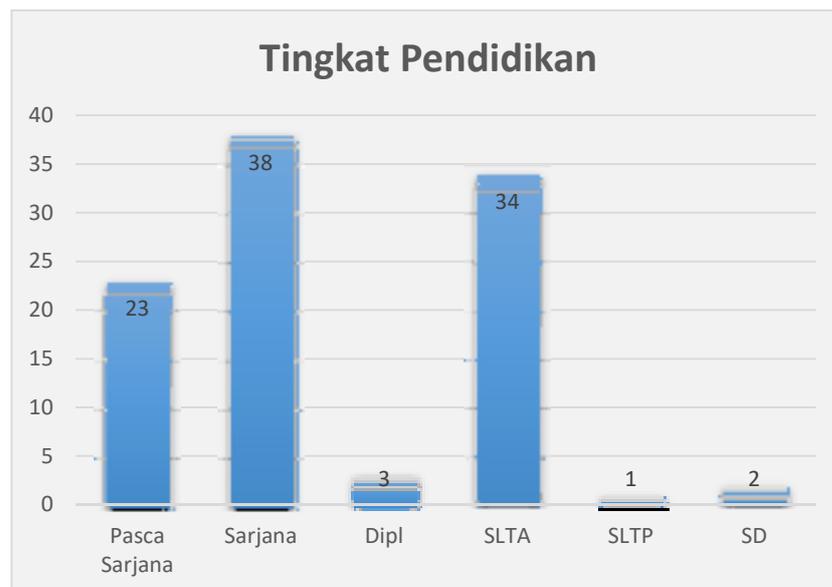
Jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan tingkat pendidikan untuk lulusan SD sebanyak 2 (dua) orang, lulusan SMP 1 (satu) orang, Lulusan SMA 34 (tiga puluh empat) orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Dua 3 (tiga) orang, lulusan Sarjana 30 (tiga puluh) orang, lulusan Pasca Sarjana 9 (sembilan) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2

Tabel I. 2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah (Orang)
SD	2
SMP Sederajat	1
SMA Sederajat	34
Diploma 3 (Sarjana Muda)	3
Sarjana	38
Pasca Sarjana	23
Doktoral	0
Total	101

Gambar I.6
Prosentase Jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan Tingkat Pendidikan



E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik kritis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan

pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim Sejahtera dan Berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan

kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM

Tabel I.3
Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	8.700	m ²
2	Bangunan Gedung terdiri :	6.525	m ²
	a. Ruang Kerja	11	unit
	b. Ruang Rapat	5	unit
	c. Ruang GSCC	1	unit
	d. Ruang Server	2	unit
	e. Mushola	1	unit
	f. Ruang saji	1	unit
	g. Ruang Laktasi	1	unit
	h. Gedung Arsip	1	unit
	i. Kantin	1	unit
	j. Gudang	1	unit
	k. Tempat Parkir		
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	4	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	3	Area
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat penjelasan mengenai pencapaian kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2019, dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi

- D. Sumber Daya Manusia
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasarana Kerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

PENCAPAIAN DAN PENETAPAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

A. RENCANA STRATEGIS 2019-2023

Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja, maka visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan Bappeda Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyesuaian target-target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim tahun 2019-2023, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan melalui Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2019 tentang Renstra Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim,

agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

1. Tujuan dan Indikator Tujuan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim.

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”

dan menetapkan Indikator tujuan dalam Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim sebagai berikut :

“ Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi) ”

2. Sasaran dan Indikator sasaran Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada periode Tahun 2019-2023 termasuk indikator sasarannya, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran 1 : Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

Indikator Sasaran 2 : Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Indikator Sasaran 3 : Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Kaltim dapat di lihat pada Tabel II.1. sebagai berikut :

Tabel II.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT									
MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik									
	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
S1.	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	85%	87%	89%	92%	94%	96%	96%
S2.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	80%	85%	89%	91%	95%	100%	100%
S3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	60%	63%	67%	70%	75%	80%	80%

Tabel II.2

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran
Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi	%	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, nasional dan Kabupaten Kota	%	(1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan RKPD 2 Penyusunan RPJMD 3 Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 4 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 5 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan 6 Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	
							(2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
							(3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan 11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

							(4)	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									13	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
									14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
							(5)	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
									16	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
									17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
							(6)	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelengga- raan Pemerintahan	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
									19	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
									20	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah
2				Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	(7)	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
									22	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

							(8)	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	23	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi
									24	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
3				Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	(9)	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	25	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah
									26	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah
							10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	28	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
							11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
									30	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel II.3

**Tabel II.3.
Indikator Kinerja Utama**

- TUGAS** : 1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- FUNGSI** : 1. Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan;

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Proporsi Program Pembangunan Daerah yang Sinergi Antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/ Kota (%)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)	1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	Mengukur keselarasan program prioritas yang sinergi antar dokumen perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	RPJMN, RKP, RPJPN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota	Persentase program kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Provinsi (RPJMD dan RKPD) yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Nasional (RPJMN, RKP), Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota (RPJMD & RKPD) dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi (Renra dan Renja)	Kepala Bappeda
			2. Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	Mengukur capaian sasaran pembangunan RJMD Kalimantan Timur, melalui realisasi sasaran pembangunan yang sebanding dengan target sasaran RPJMD Kalimantan Timur	RPJMD dan RKPD	Persentase realisasi indikator sasaran pembangunan RPJMD dibanding target indikator sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	
			3. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	Mengukur kinerja pembangunan yang didukung oleh data melalui pengoptimalan penggunaan aplikasi yang terintegrasi dan pengoptimalan One Data One Map	Aplikasi siData, SIPD, SIPPD, Tepra dan Geospasial, data sektoral dan spasial	Persentase kinerja pembangunan yang didukung oleh data melalui pengoptimalan pembangunan aplikasi yang terintegrasi dan pengoptimalan One Data One Map	

B. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel. II.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

TOTAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 : Rp.48,980,400,000,-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota	Proporsi rancangan Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	87
2	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	85
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	63

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PROGRAM PRIORITAS		32,468,375,000	
(1)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7,085,850,000.00	APBD
(2)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3,407,400,000.00	APBD
(3)	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4,824,900,000.00	APBD
(4)	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	2,564,300,000.00	APBD
(5)	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	3,780,400,000.00	APBD
(6)	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	1,911,940,000	APBD
(7)	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3,621,425,000.00	APBD
(8)	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3,772,160,000.00	APBD
(8)	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	1,500,000,000.00	APBD
B. PROGRAM PENDUKUNG		16,512,025,000	
(1)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,450,375,000.00	APBD
(2)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,061,650,000.00	APBD
TOTAL		48,980,400,000	

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 48,980,400,000,-. Melalui mekanisme perubahan, APBD 2019 menjadi Rp 55.286.100.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 15.633.838.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 55.286.100.000,-. Sehingga Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp 70,919,938,000,- Adapun realisasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp 65,054,511,734,- (91.73%) dengan rincian yaitu untuk Belanja Tidak Langsung Rp 13.208.405.716,- (84.49%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 51,846,106,017.61,- (93.78%).

2. Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019

Tabel II.5

TARGET BELANJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	15,633,838,000	13,208,405,716	84.49
2	Belanja Langsung	55,286,100,000	51,846,106,017.61	93.78
Jumlah		70,919,938,000	65,054,511,734	91.73

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Bappeda Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.6

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGI

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota	25,606,435,000	77.62	Anggaran ini terkait konsistensi perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota
2	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	5,362,160,000	16.25	Anggaran ini terkait dengan capaian pembangunan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	2,021,940,000	6.13	Anggaran ini terkait kualitas data dan informasi pembangunan daerah

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel II.7

Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2019

TUJUAN / SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi	77.50%			55,658,860,000
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, nasional dan Kabupaten Kota	87%	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8,635,850,000
				a	Penyusunan RKPD	1,973,000,000
				b	Penyusunan RPJMD	865,000,000
				c	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	2,532,000,000
				d	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	960,000,000
				e	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	919,100,000
				f	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	1,386,750,000

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

TUJUAN / SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
				2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7,169,975,000
				a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	5,839,975,000
				b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,330,000,000
				3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4,077,660,000
				a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,237,510,000
				b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	897,000,000
				c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	1,943,150,000
				4 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	2,879,900,000
				a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	820,000,000
				b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	833,750,000
				c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1,226,150,000
				5 Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	2,221,625,000
				a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	1,390,525,000
				b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	126,450,000
				c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	704,650,000
				6 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	621,425,000
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	431,425,000
				b. Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	190,000,000

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

TUJUAN / SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4	5		6
2	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	7	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3,862,160,000
				a.	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1,928,160,000
				b.	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1,934,000,000
				8	Program Pengendalian Rencanan Pembangunan Daerah	1,500,000,000
				a.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	750,000,000
				b.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	750,000,000
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	9	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	2,021,940,000
				a.	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	1,206,540,000
				b.	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	815,400,000
PROGRAM PENDUKUNG						30,459,725,000
				10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,549,875,000
				a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	8,549,875,000
				11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14,118,450,000
				a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	8,130,671,000
				b.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5,987,779,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN 2019

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel III-1
Hasil Evaluasi Pada Implementasi SAKIP
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019

No	Komponen yang Dinilai	Bobot 2018	Bobot 2017	Nilai 2018	Nilai 2017	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	30	24.66	25.01	(-0.35)
2	Pengukuran Kinerja	25	25	20.31	19.38	(+0.93)
3	Pelaporan Kinerja	15	15	12.85	11.95	(+0.90)
4	Evaluasi Kinerja	10	10	7.48	6.94	(+0.54)
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	20	13.92	14.42	(-0.50)
NILAI HASIL EVALUASI		100	100	79.22	77.69	(+1.53)
KATEGORI PENILAIAN				BB	BB	

2. Rekomendasi

Tabel III-2
Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1.	Perencanaan Kinerja Terhadap Kualitas Perencanaan kinerja Tahunan, untuk Implementasi supaya lebih meningkatkan :		
a.	Target Kinerja ditetapkan dengan baik	Target Kinerja disesuaikan dengan RENSTRA 2019-2023 Bappeda Prov. Kaltim	CASCADE
b.	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Ya Kegiatan merupakan cara untuk mencapai	- Indikator Utama Kinerja

		<p>sasaran. Melalui formulasi perhitungan pada kegiatan maka realisasi Sasaran (indikator Kinerja) dapat diperoleh</p>	<p>- LKjIP Bab III (C. Analisis Capaian Kinerja)</p>
c.	<p>Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai</p>	<p>Ya, Kegiatan telah didukung dengan anggaran yang sesuai dengan target yang dilaksanakan</p>	<p>Penyertaan Anggaran DPA pada Rencana Aksi</p>
	<p>Dokumen PK telah selaras dalam RENSTRA</p>	<p>Ya, Dokumen PK telah selaras dalam RENSTRA</p>	<p>Penyelarasan Perjanjian Kinerja Pada Program/Kegiatan serta indikator pada Resntra</p>
	<p>Dokumen PK telah selaras dengan Renstra</p>	<p>Ya Dokumen PK telah selaras, Penyusunan Perjanjian Kinerja tidak lepas dari Perencanaan Kinerja Pada RENSTRA</p>	<p>Dokumen Perjanjian Kinerja, Cascade Kinerja</p>
	<p>Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan</p>	<p>Dokumen PK telah menetapkan Rencana Aksi</p>	<p>Rencana Aksi dengan Rencana Kegiatan Subbidang</p>
2	Pelaporan Kinerja		
	<p>Penyampaian Informasi Kinerja terhadap Laporan Kinerja supaya menyajikan infoemasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya</p>	<p>Ya pada LKjIP Bab III telah dilakukan perbaikan dengan menampilkan Tabel Sumber daya dan memberikan analisis</p>	<p>Melampirkan tabel Efisiensi sumber daya dan memberikan analisis</p>
3	Evaluasi Internal		
a.	<p>Kualitas Evaluasi</p>		
-	<p>Pemantauan Rencana Aksi dapat dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja</p>	<p>Ya, pemantauan dilakukan dalam rangka mengendalikan Kinerja</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi</p>
-	<p>Pemanfaatan Rencana Aksi dapat memberikan alternatif perbaikan yang dilakukan dalam bentuk <i>action plant</i>, juknis maupun SOP</p>	<p>Ya, Rencana Aksi memberikan alternatif solusi untuk Juknis atau SOP</p>	<p>- SOP - KAK</p>
b.	<p>Pemanfaatan Evaluasi</p>		
	<p>Untuk hasil Evaluasi seluruhnya dapat ditindak lanjuti dalam langkah- langkah nyata</p>	<p>Ya Hasil Evaluasi ditindak lanjuti output kegiatan</p>	<p>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p>

B. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2019 merupakan tahun I dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu :

Tabel III-3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Keterangan : berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Tabel III-4
Target Dan Capaian Kinerja Organisasi
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULANAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	87%	TRIWULAN I	87%	
					TRIWULAN II		
					TRIWULAN III		
					TRIWULAN IV		43.33%
2	Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	85%	TRIWULAN I	85%	
					TRIWULAN II		
					TRIWULAN III		
					TRIWULAN IV		83%
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	63%	TRIWULAN I	63%	
					TRIWULAN II		
					TRIWULAN III		
					TRIWULAN IV		80%

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov, Kaltim

Kuantitatif, Indikator kuantitatif berupa angka (angka atau persentase nilai dollar, tonase, adalah contohnya). Indikator kualitatif merupakan observasi deskriptif Meskipun indikator kuantitatif tidak selalu lebih obyektif, ketepatan/presisi angka mereka cenderung membuat adanya kesepakatan tentang penafsiran data hasil, sehingga biasanya lebih disukai. Namun, meskipun suatu indikator kuantitatif yang efektif telah digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka-angka dan persentase, dengan kekayaan informasi yang membuat hasil program menjadi lebih hidup.

Dari Tabel III.4 diatas dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerja organisasi Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019 yang menggambarkan perkembangan realisasi dan capaian pada periode setiap triwulan dan realisasi yang dicapai pada akhir triwulan (realisasi Tahunan).

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TUJUAN 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

SASARAN 1. Konsistensi Perencanaan Provinsi dengan dokumen Perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel III-5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	43.33%	49.80%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III-6
Perbandingan antara realisasi Tahun 2019 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan /Penurunan
			2019	Tahun 2019
1	2	3	4	$7 = (6-5) / 5 \cdot 100\%$
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	43.33%	43.33%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III-7
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	96%	43.33%	45.14%

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran 1. : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 1. : Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota

- KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Realisasi dari Indikator Kinerja "Persentase RKPd terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd" dengan menyandingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dan diperoleh 26 Program yang sinergis dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dari 60 program yang dilaksanakan pada tahun 2019.
- b. Perbandingan antara target (87%) dan realisasi (43.33%) pada Indikator Kinerja "Persentase RKPd terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd" dengan capaian 49,80%.
- c. Rendahnya Capaian di karenakan Realisasi Indikator Kinerja sasaran ini juga rendah, juga pedoman pada Dokumen Perencanaan masih ada yang berbeda yaitu antara Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota, sehingga hitungan sinergitas tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/kota belum terlaksanan.

- PENINGKATAN DAN PENURUNAN

- a. Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja "Prosentase RKPd terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd" adalah 43.33% atau sama dengan realisasi tahun 2019.

- b. Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2014-2018 sebelumnya.

Sedangkan data kabupaten/Kota tidak dapat digunakan sebagai alat ukur dikarenakan: Visi Misi Gubernur Lebih dulu sedang Bupati dan Walikota masih menggunakan visi masa jabatan mereka yang belum sinergis dengan Visi Misi Prov Kaltim, atau kab/Kota belum selaras dengan RKPD/RENSTRA SKPD Provinsi ; RPJMD Dan RKPD Provinsi menggunakan Periode Baru, sedang Kab/Kota belum semua menyesuaikan karena belum melaksanakan PilBUP dan PILWALI.

- c. Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan 45.14%

- ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penyesuaian/revisi RPJMD tahun 2018-2023 Prov. Kaltim dengan RPJMP tahun 2020-2025 Nasional.
- b. Penyesuaian program pada RPJMD tahun 2018 -2023 Prov. Kaltim dengan arah kebijakan RPJMP tahun 2020-2025
- c. Penyesuaian RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD tahun 2018-2023 Prov. Kaltim dan RKPD Prov. Kaltim yang disesuaikan dengan RPJPD tahun 2020-2025 dan RKP Nasional.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sasaran 1. : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 1. : Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan Kegiatan sebagai Berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(Indikator Kinerja: Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran) dengan target 80% dengan realisasi 92.5% maka capaian 115.63%.

Kegiatan :

(1) Penyusunan RKPD

Hasil keluaran dari kegiatan Penyusunan RKPD adalah Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019 dan Dokumen Perubahan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019).

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.

Tahapan Penyusunan RKPD :

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Prov. Kaltim
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Prov. Kaltim

- d. Pelaksanaan Musrembang
 - e. Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD Prov. Kaltim
- (2) Penyusunan RPJMD
- Hasil keluaran Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim tahun 2019-2023)
- Tahapan Penyusunan RPJMD :
- a. Persiapan Penyusunan RPJMD
 - b. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
 - c. Penyusunan rancangan RPJMD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
 - e. Perumusan rancangan akhir RPJMD
 - f. Penetapan RPJMD
- (3) Penyelenggaraan musrenbang provinsi dengan target anggaran Hasil Keluaran yaitu :
- Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
- Maksud yang ingin dicapai dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah kesepakatan bersama terhadap tujuan, sasaran dan program/kegiatan prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2020 hasil analisa permasalahan dan isu strategis, sedangkan tujuan dari Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk menjangring saran dan masukan baik berupa isu-isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020.
- Acara dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Senyur Balikpapan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Forum ini merupakan agenda penting dalam menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. RKPD 2020 harus dapat merespon dan menjawab permasalahan pembangunan yang belum diselesaikan pada pelaksanaan RKPD tahun 2019 serta dapat memberikan panduan arah kebijakan pembangunan sasaran pembangunan tahun pertama RPJMD Kaltim 2019-2023.

Tema RKPD Tahun 2020 menitikberatkan pada prioritas dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Kompetensi SDM dalam memanfaatkan dan mengembangkan Teknologi, dengan didukung oleh infrastruktur wilayah yang memadai untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi. Globalisasi yang sudah pasti kita hadapi, menuntut adanya efisiensi

dan daya saing dalam dunia usaha. Untuk itu diperlukan SDM yang terus mampu melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Forum ini menghasilkan 5 (lima) kesepakatan yang di tandatangani oleh pihak terkait. Kesepakatan tersebut antara lain :

1. Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 akan dilakukan penyempurnaan terhadap fokus utama pembangunan yang disesuaikan dengan permasalahan utama dan isu strategis daerah.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara akan disempurnakan kembali berdasarkan masukan dan saran dari peserta forum.
3. Penetapan target kinerja RKPD agar memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah dan diperlukan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar target RKPD 2020 dapat dicapai.
4. Hasil penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2019 akan diselenggarakan paling lambat pada minggu ke tiga bulan Maret Tahun 2019

- Pra MUSRENBANG RKPD Provinsi Kaltim

Kegiatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyelaraskan program/kegiatan prioritas

Provinsi Tahun 2020 dan usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2020 yang akan masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 April sampai dengan 9 April 2019 dengan dihadiri oleh 10 Kabupaten/Kotayang ada di Kalimantan Timur.

Selain membahas usulan Kabupaten/Kota pada belanja langsung program prioritas Perangkat Daerah Provinsi, kegiatan ini juga membahas Usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Melalui Pra Musrenbang ini diharapkan ada 4 (empat) substansi utama yang dapat disepakati antara Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yakni :

- (1) Sinkronisasi Program/ Kegiatan Prioritas;
- (2) Sinkronisasi Indikator dan Target Kinerja;
- (3) Kesepakatan Pendanaan,dan;
- (4) Kesepakatan Pembagian Tugas Pelaksanaan Program Prioritas Berdasarkan Kewenangan.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam proses Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2020 dalam hal penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota.

- Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Prov. Kaltim melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim 2018-2023. Musrenbang dilaksanakan Kamis 17 Januari 2019 di Pendopo Lamin Etam Kaltim. Musrenbang ini bertujuan membahas bagaimana rencana pembangunan Kaltim lima tahun ke depan selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun telah mengakomodir visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim serta bersesuaian dengan kabupaten dan kota sehingga jadi payung atau dasar pelaksanaan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan. Untuk mendapatkan masukan sekaligus sinkronisasi dari kabupaten dan kota terhadap program pembangunan daerah dalam kurun waktu 2018-2023. "Musrenbang ini untuk mendapatkan masukan-masukan baru dari kabupaten dan kota agar ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 untuk dilaksanakan masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Prov Kaltim. ",Musrenbang RPJMD Tahun 2018-2023 bertema Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat," menghadirkan pemateri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, Direktur Daerah Tertinggal Terluar dan Perdesaan BPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo dan Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono. Kegiatan dihadiri kepala daerah bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota se-Kaltim serta dihadiri Ketua DPRD Kaltim HM Syahrudin dan Pj Sekdaprov Dr Hj Meiliana, Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain dan Danrem 091 ASN Brigjen TNI Widi Prasetyono serta jajaran FKPD Kaltim, Asisten, Staf/Tenaga Ahli dan Staf Khusus Gubernur, Kepala Biro dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Anggota DPR RI/DPD

RI Daerah Pemilihan Kaltim, Wakil Ketua/Anggota DPRD Kaltim serta Bappeda Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat dan akademisi, pimpinan BUMN/BUMD dan instansi vertikal maupun kementerian/Lembaga dirangkai penandatanganan kesepakatan target kinerja pembangunan daerah Provinsi Kaltim dengan kabupaten dan kota.

Selanjutnya hasil Musrenbang tersebut akan dibawa ke DPRD Kaltim. Setelah itu DPRD akan menelaah dan merevisi permohonan ini, sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). "setelah diusulkan, kemudian disahkan, sehingga pelaksanaan RPJMD Provinsi dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang diharapkan bersama,".

- (4) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah adalah kegiatan koordinasi yang dilakukan antar provinsi di regional Kalimantan dengan hasil keluaran yaitu terselenggaranya Forum Persiapan Usulan Regional Kalimantan, Forum Finalisasi Usulan Regional Kalimantan dan Pelaksanaan Musrebang Regional Kalimantan.
- (5) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan dengan hasil Keluaran yaitu terselenggaranya tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi (SIPPD)
- (6) Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P APBD dengan hasil keluaran
 - a. Dokumen Rancangan KUA-PPAS,
 - b. Dokumen KUA-PPAS,
 - c. Dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan
 - d. Dokumen Perubahan KUA-PPAS.

2. Program Peningkatan Persentase Kelembagaan Pemerintah Daerah

(Indikator Kinerja : Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi) dengan target 15% dan realisasi 13.90% maka capaian program adalah 92.67%.

Kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan hasil keluaran berupa
 - a. Pelaksanaan Rapat Staf terkait Kinerja,
 - b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi tingkat Eselon II,III dan IV,
 - c. Pelaksanaan Rapat Kinerja PNS,
 - d. Pelaksanaan Rapat Kinerja Pegawai Non PNS,
 - e. Kunjungan Kerja dari luar Institusi,
 - f. Pelaksanaan kegiatan Senam Sehat setiap Jumat dan
 - g. Pelaksanaan Kegiatan pameran dan realisasi tahun 2019 adalah 38 Rapat koordinasi.
- (2) Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur dengan target anggaran Rp.1,330,000,000,- dan realisasi Rp. 1,274,553,000,-. Hasil keluaran Banyaknya PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek yaitu :

1. Bimtek :

- a. : Bimtek Pemberkasan Arsip II (PNBP) 2 (dua) orang
- b. : Bimtek Capacity Building Water Resources Management 1 (satu) orang
- c. : Bimtek dan Konsultasi Nasional penyusunan dokumen pemilihan dan tata cara evaluasi penawaran pada jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi 10 (sepuluh) orang
- d. : Diklat Penyusunan RPJMD dan RKPD 24 (dua puluh empat) orang

2. Diklat :

- e. : Diklat BPSDM 2 (dua) orang

3. Seminar :

f : Seminar dan Workshop Matematika, Statistika dan Aplikasinya tahun 2019 1 (satu) orang

4. Pendidikan :

g : Pendidikan Sarjana (S1) 4 (empat) orang

3. Program Perencanaan Bidang Ekonomi

(Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Ekonomi) dengan target 60% realisasi 66,11% maka capaian program 110.18%

Kegiatan :

(1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan LH dengan hasil keluaran :

a. Dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA dan LH yang berisi :

a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya alam dan lingkungan hidup

a.2. Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang SDA dan LH

- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub bidang SDA dan LH

- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan sub bidang SDA dan LH

a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup baik

terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
 - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
 - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan
 - Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub Bidang SDA dan LH Tahun 2019
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA dan LH

b. Dokumen Laporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

b.1. Rapat persiapan Penyusunan RAD TPB/SDGs

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's), merupakan komitmen Global dan Nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbaikan pembangunan yang inklusif melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif.
- Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDG's di Provinsi Kalimantan Timur.
- TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, OMS dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu

merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

- (2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan dengan hasil keluaran :
 - a. Dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang berisi :
 - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - a.2. Perencanaan sub bidang
 - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan
 - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan
 - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan
 - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan baik terhadap OPD yang

berkoordinasi langsung dan Kab/Kota terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda se-Kalimantan
- Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
- Forum Perangkat Daerah
- Pra Musrenbang
- Musrenbang RKPD
- Musrenbang Nasional
- RAKORTEKBANG Regional II

a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang bersifat vertikal dan horisontal

- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan Tahun 2019

a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan

b. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

- (3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata dengan hasil keluaran berupa :
- a. Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Sub.Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata yang didokumentasikan setiap triwulan kegiatan yang berisi :
 - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
 - a.2. Perencanaan sub bidang
 - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
 - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
 - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
 - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
 - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
 - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
 - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
 - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan

- Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata Tahun 2019
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata

4. Program Perencanaan Bidang pemerintahan Sosial Budaya

(Indikator Kinerja : Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahun 2019 di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya) dengan target 50% dan realisasi 63.60% dan capaian 127.20%

Kegiatan :

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan hasil keluaran berupa :

- a. Dokumen Laporan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi :
 - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a.2. Perencanaan sub bidang
 - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
 - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
 - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
 - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
 - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan
 - Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang

- Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Laporan Koordinasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.
- b.1. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pada hakekatnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pembangunan masyarakat dipandang sebagai upaya terorganisir secara berkelompok yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk lebih baik khususnya bagi anggotanya. Sedangkan dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional itu sendiri.

b.2. Kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan :

- Indikator Pendidikan diantaranya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kelulusan.
- Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan SNP. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi ketentuan tentang standar nasional pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas : Standar Kompetensi lulusan; Standar Isi; Standar proses Pendidikan; Standar Penilaian; Standar Pendidikan dan Tenaga kependidikan; Standar pengelolaan; Standar sarana dan Prasarana; Standar Pembiayaan; Capaian Indikator dan Sub Indikator Standar Pengelolaan; Capaian Indikator dan Sub Indikator Standar Pembiayaan.

- Berbagai cara telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pembangunan masyarakatnya antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, pemanfaatan/ pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan derajat Pendidikan dan kesehatan. Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih ada beberapa

program pendidikan dan kesehatan yang belum mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian upaya-upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial dengan hasil keluaran berupa :

a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial yang berisi :

a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial

a.2. Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Kesejahteraan Sosial

a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Kesejahteraan Sosial baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda se-Kalimantan
- Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
- Forum Perangkat Daerah
- Pra Musrenbang
- Musrenbang RKPD
- Musrenbang Nasional
- RAKORTEKBANG Regional II

a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Kesejahteraan Sosial yang bersifat vertikal dan horisontal

- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019

a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial

b. Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

b.1. Penanggulangan kemiskinan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sasaran pokok pembangunan dalam periode saat ini adalah :

- Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 sebesar 8%
- Target Inflasi Tahun 2019 sebesar 3,50%
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4 – 5% & Tahun 2019.

- Tingkat Kemiskinan sebesar 7-8% pada Tahun 2019.

Pemerintah selanjutnya menetapkan 4 (empat) kelompok program penanggulangan kemiskinan berdasarkan karakteristik penerima manfaat dan tujuannya :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Kelompok pertama adalah program – program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain : Program Keluarga Harapan, (PKH – *conditional cash transfer*), bantuan langsung tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*), bantuan langsung dalam bentuk *in-kind*, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (*raskin*), serta himbauan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (*Community Driven Development*). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sarasannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan menurut RPJMN 2015-2019 dengan kolaborasi pemerintah daerah , dunia usaha, masyarakat dalam pengembangan ekonomi local dan penurunan kemiskinan diantaranya:

- a. Pengurangan Beban dengan melaksanakan :
 - a.1. Perlindungan sosial yang komperhensif
 - a.2. Pelayanan dasar
- b. Peningkatan Pendapatan dengan melakukan usaha Penghidupan berkelanjutan
 - Kelompok usaha bersama
 - Akses Permodalan
 - Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
 - Pengembangan Keterampilan dan layanan usaha

- Pengembangan kewirausahaan

(3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dengan hasil keluaran berupa :

a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan

a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan

a.2. Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Kesejahteraan Sosial

a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Pemerintahan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota ataupun terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda se-Kalimantan
- Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim

- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Pemerintahan yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub.Bagian Pemerintahan Tahun 2019
- a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Sub.Bagian Pemerintahan
- b. Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).
- b.1. Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada tahapan Verifikasi dan Wawancara terhadap Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan menjadi nominator Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019.
- b.2. Nominasi kategori Kota adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara kategori Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- b.3. Tim penilai terdiri dari :
- Tim penilai utama dengan koordinator Siti Sugiyanti, SE, MM (Biro Pemerintahan Setda Prov.Kaltim),

- Tim penilai independen dengan koordinator Dr. Suyadi (Universitas Mulawarman) dan
- Tim penilai teknis dengan koordinator Drs. Hariyo Santoso (Bappeda Provinsi Kaltim), dengan beranggotakan 12 (dua belas) orang yaitu Dr. Abdullah Karim (Unmul); Rusliansyah Ilham Karsidi, SE., M.Si (Unmul); Ahmad Noor, SE., ME (Unmul); Yusliando, ST (Bappeda Provinsi Kaltim); Noviady Dwi Noorcahyo, ST., M.Si (Bappeda Provinsi Kaltim); H. Andrie Asdi, SH (Bappeda Provinsi Kaltim); Berlin Friniko Sihaloho, SE (Bappeda Provinsi Kaltim); Dedy Pudja Wardana, ST (Bappeda Provinsi Kaltim); Ibnu Abbas, S.Sos., MT (Bappeda Provinsi Kaltim); Hj. Nani Nuraini, ST., M.T; Sri Rezeki, ST., M.Si; dan Ir. Noor Albarakati, MT.
- Tujuan adanya PPD ini agar Mendorong setiap daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan dan Menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Adapun yang menjadi objek dan ruang lingkup penilaian adalah : Dokumen RKPD, Proses penyusunan RKPD, Pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, Inovasi yang dikembangkan serta Penilaian Khusus Terkait Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
- Mekanisme penilaian pada tahap ini dimulai dari presentasi setiap kabupaten dan kota nominasi selama 20 menit, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi selama 15 menit. Presentasi setiap

daerah nominasi akan disampaikan oleh masing-masing kepala Bappeda Kabupaten dan Kota didampingi oleh tim.

- Penilaian presentasi dan wawancara ini akan menetapkan dua nominasi yaitu satu Kota dan satu Kabupaten yang akan lanjut pada penilaian tahap selanjutnya yaitu penilaian dokumen RKPD Kabupaten dan Kota oleh tim pusat (Bappenas).
- Dari berbagai tahapan penilaian maka penetapan Kabupaten /kota terbaik yaitu:
 1. Kabupaten Kutai Kartanegara,
 2. Kabupaten Kutai Timur,
 3. Kabupaten Berau

5. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

(Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan realisasi tahunan di Bidang Prasarana Wilayah) dengan target 55% dan realisasi 50.95% maka capaian adalah 92.64%.

(1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan dengan hasil keluaran :

- a. Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan
 - a.1. Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan koordinasi Prasarana Perhubungan
 - a.2. Perencanaan sub bidang
 - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana Perhubungan

- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana Perhubungan
 - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Prasarana Perhubungan
- a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Prasarana Perhubungan Sektor Pemerintahan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
 - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
 - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan
- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan
 - Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Prasarana Perhubungan yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat

- Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
- Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
- Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019

a.6. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Sub. Prasarana Perhubungan

b. Laporan Akhir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Indikasi Program Pembangunan Infrastruktur Sumber Dana Bantuan Keuangan.

(2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Tata Ruang dengan hasil keluaran berupa

a. Dokumen Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan sektor sumber daya air dan tata ruang

a.1. Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan sumber daya air dan tata ruang

a.2. Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana Sumber Daya Air Dan Tata Ruang
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana Sumber Daya Air Dan Tata Ruang
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Prasarana Sumber Daya Air Dan Tata Ruang

a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Prasarana Sumber Daya Air Dan Tata Ruang baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
- RENSTRA Perangkat Daerah(Verifikasi)

- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan
 - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan
 - Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional
 - RAKORTEKBANG Regional II
 - a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Prasarana Sumber Daya Air Dan Tata Ruang yang bersifat vertikal dan horisontal
 - Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019
 - a.6. Penyusunan Buku Laporan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - b. Dokumen Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
- (3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman dengan hasil Keluaran berupa
- a. Dokumen laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman

- a.1. Pembuatan SK Tim pelaksana kegiatan Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman sub.bid Prasarana, Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman
 - Menyiapkan dan merumuskan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana, Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman.
 - Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Prasarana, Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman
 - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Prasarana, Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman
- a.2. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Prasarana Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
 - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitas)
 - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitas)
 - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
 - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)
- a.3. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan
 - Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
 - Rakor Bappeda se-Kalimantan
 - Musrenbang RPJMD Prov. Kaltim
 - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020
 - Forum Perangkat Daerah
 - Pra Musrenbang
 - Musrenbang RKPD
 - Musrenbang Nasional

- RAKORTEKBANG Regional II
- a.4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Prasarana Ciptakarya, Perumahan dan Pemukiman yang bersifat vertikal dan horisontal
 - Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi,
 - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
 - Asistensi P-APBD Sub. Prasarana Perhubungan Tahun 2019
- a.5. Penyusunan Buku Laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman

6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

(Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) dengan target 78 dan realisasi sebesar 79,22 maka capaian 102.56%

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil keluaran berupa :

- a. Dokumen Renstra tahun 2019-2023 Bappeda Prov. Kaltim
 - a.1. Penyusunan SK Tim Penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 Bappeda Prov. Kaltim
 - a.2. Rapat Persiapan
 - Menyusun Matrik yang memuat Tujuan, sasaran, indikator kinerja, Program dan kegiatan.
 - a.3. Penyusunan Draft Dokumen Renstra
 - Penginputan Program dan kegiatan pada SIPPD
 - Penyesuaian Program/Kegiatan dengan Indikator Program dan Indikator Kegiatan.
 - Penyusunan Draft Dokumen Renstra

- Penetapan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan
 - Asistensi dari Tim evaluasi Renstra dan dari Inspektorat
- a.4. Dokumen RENSTRA Final
- Terbitnya Pergub Renstra
 - SK Kepala tentang Renstra
 - Dokumen Renstra 2019-2023
 - Indikator Kinerja Utama 2019-2023
- b. Dokumen RENJA Murni tahun 2020 dan RENJA Perubahan tahun 2019
- b.1. Rapat Penyusunan SK Tim penyusunan Perubahan Renja 2019 dan Renja 2020
 - b.2. Penyusunan Draft Dokumen perubahan Renja 2019 dan Renja 2020.
 - b.3. Input data Program kegiatan dan rencana anggaran
 - b.4. Verifikasi rencana kerja Perubahan 2019 dan murni 2020
 - b.5. Penyempurnaan hasil verifikasi rancangan akhir RENJA PD
 - b.6. Penyempurnaan Hasil verifikasi rancangan akhir Renja perubahan 2019 dan murni 2020
 - b.7. Penetapan Renja Perubahan 2019 dan Murni 2020
- c. RKA Murni Tahun 2020 dan RKA Perubahan Tahun 2019
- Merupakan dokumen penganggaran adalah RKA. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- d. DPA Murni tahun 2020 dan DPA Perubahan Tahun 2019

(2) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Hasil keluaran berupa :

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Prov. Kaltim terkait belanja pegawai, modal dan barang serta Tahun 2019

b. Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah

b.1. Menyusun Draft LKjIP 2019 Bab I

- Dasar Pembentukan Organisasi
- Kedudukan Tugas fungsi
- Struktur Organisasi
- Sumber Daya Aparatur

Menabulasi dan menghitung sumber daya aparatur pada Bappeda Prov. Kaltim dimulai dari struktur jabatan pimpinan, Staf PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan jenis Kelamin,, Golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan

- Aspek Strategis
- Permasalahan Utama
- Sarana dan Prasarana
- Sistematika Penyajian

b.2. Menyusun Draft LKjIP Bab II

- Pembahasan Rencana Strategi
- Indikator Utama
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kinerja Tahunan

b.3. Menyusun Draft LKjIP Bab III

- Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahunan
- Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019
 - ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
 - ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Realisasi Capaian

b.4. Menyusun Draft LKjIP Bab IV

c. Laporan Evaluasi Kinerja Renja tahun 2019

Laporan ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap Matrik Evaluasi Renja Bappeda Prov. Kaltim yang dibuat setiap triwulan dan diinput di system e-Kinerja

d. Pengukuran Kinerja Tahunan tahun 2019

Penyusunan Pengukuran Kinerja merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2019

1	2	3	%	%	Tingkat efisiensi
			CAPAIAN KINERJA (>100%)	Penyerapan Anggaran	
1			4	5	6
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	49.80%	98.66%	-48.85%

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi Pada Indikator Kinerja Proporsi Rencana Program Pengembangan Daerah dan Sinergi antara Provinsi , Nasional dan Kabupaten/Kota dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah belum efisien senilai 48,85% ($49.80\% - 98.66\% = -48.85\%$) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya tahun 2019 dikatakan belum efisien.

Dikatakan belum efisien, karena pedoman pada Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota belum sinergis yaitu perbedaan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota, sehingga tingkat sinergitas tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/kota belum terlaksana, tahun 2019 Kabupaten/Kota data sebagai pendukung.

TUJUAN 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

SASARAN 2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel III-9
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	83%	97.65%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III-10
Perbandingan antara realisasi Tahun 2019 dengan tahun
lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan /Penurunan
			2019	Tahun 2019
1	2	3	4	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	83%	83.0%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III-11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan
target RENSTRA 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	100%	83%	83.0%

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran 2. : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

Indikator Kinerja 2. : Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur

- KEBERHASILAN/KEGAGALAN
 - a. Capaian realisasi diperoleh dengan menyandingkan dokumen perencanaan RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan dokumen perencanaan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota, maka diperoleh capaian konsistensi kegiatan antara RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota terhadap RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan realisasi sebesar 83% konsistensi Kegiatan.
 - b. Realisasi ini dapat dikatakan belum sepenuhnya meningkat kinerja tetap ada perbedaan Dokumen Perencanaan. Di tingkat Provinsi Telah menggunakan Dokumen Renstra 2019-2023 dan renja pun mengikuti, sedang Kabupaten/Kota belum menyelenggarakan PIKAD sehingga RPJMD/RKPD Kab/Kota belum semuanya terintegrasi. Namun kita tetap

harus memperhatikan sinergi antara RPJMD/RKPD Prov. Kaltim dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah.

c. Realisasi Indikator "Persentasi capaian sasaran Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" dimana target 85% dan realisasi 83% maka capaian Indikator Kinerja adalah 97.65%.

- **PENINGKATAN DAN PENURUNAN**

a. Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" adalah 43.33% atau sama dengan realisasi tahun 2019.

b. Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2014-2018 sebelumnya.

c. Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan 83%.

- **ALTERNATIF SOLUSI**

Perlunya pelaksanaan sinergi dokumen perencanaan di Provinsi Kalimantan Timur.

a. Sinergi RPJMD/RKPD Prov. Kaltim dengan program dan Kegiatan di RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

- b. Sinergi RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan Program dan Kegiatan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sasaran 2. : Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah

Indikator Kinerja 2. : Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai Berikut :

1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah) dengan realisasi 73.73%
 - (1) Monitoring dan Pelaporan Hasil pelaksanaan Pembangunan dengan hasil keluaran berupa :
 - a. Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan, Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ)
 - Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Kaltim pada tanggal 11 Juni 2019
 - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pelaksanaan pembangunan tahun 2018, merupakan kewajiban konstitusional dan laporan perkembangan tahunan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kami selaku Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 yang harus disampaikan kepada anggota DPRD

- Isi Materi : Kondisi pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Tingkat kemiskinan, Laju inflasi, Pendapatan, Belanja Daerah, Pembahasan, Upaya pencapaian dan kegiatan pendukung pada Misi I-V, Dana Dekon dan kegiatannya.
- (2) Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan hasil keluaran adalah :
- a. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD
Penyampaian evaluasi Renja SKPD setiap Triwulan I-IV pada system e-Kinerja.
 - b. Laporan Semester RKPD Kabupaten/Kota.
Penyampaian evaluasi RKPD Kabupaten /kota setiap semester.
 - c. Dokumen Evaluasi RKPD
Pelaksanaan Evaluasi RKPD terhadap target, realisasi anggaran dan kegiatan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-12
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2019

1	2	3	%	%	Tingkat Efisiensi
			CAPAIAN KINERJA (> 100%)	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
2	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	97.65%	97.71%	-0.06%

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi pada Indikator Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dimana persentase Capaian Kinerja

terhadap persentase penyerapan anggaran adalah belum efisien senilai 1.01% dengan perhitungan $(97.65\% - 97.71\% = -1.01\%)$ dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya indikator Kinerja Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2019 dikatakan belum efisien.

Perbedaan dokumen RPJMD Provinsi Kaltim dan RPJMD Kabupaten Kota mengakibatkan perbedaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin disinergikan dan di capai, dimana Perencanaan di tingkat Provinsi dan telah menggunakan dokumen Renstra 2019-2023 dan dokumen Renja pun menyesuaikan, sedangkan Kabupaten/Kota belum menyelenggarakan PILKADA sehingga RPJMD/RKPD Kab/Kota belum semuanya terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Provinsi. Namun tetap pula kita memperhatikan sinergi antara RPJMD/RKPD Prov. Kaltim dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah.

Belum efisiennya sumber daya dikarenakan capaian kinerja lebih kecil dari 100%. Tingkat efisien dapat dikatakan efisien dengan baik apabila capaian kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran lebih besar dari 100% ($>100\%$).

TUJUAN 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

SASARAN 3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel III-13
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	80%	126.98%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III-14
Perbandingan antara realisasi Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan /Penurunan
			2019	Tahun 2019
1	2	3	4	7 = (6-5) / 5*100%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80.00%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III-15
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80%	100.00

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran 3. : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Indikator Kinerja 3. : Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data

- **KEBERHASILAN/KEGAGALAN**
 - a. Realisasi indikator kinerja “Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data” di peroleh dengan melakukan perhitungan terhadap Realisasi penggunaan data-data yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya ; SIDATA dengan realisasi 83% ; SIPD dengan realisasi 37% ; TEPPRA dengan realisasi 100%; SIPPD dengan realisasi 100%; dari data pendukung diperoleh realisasi sebesar 80%.
 - b. Perbandingan antara realisasi (80%) dan target (80%) pada indikator kinerja ini diperoleh hasil capaian 100%. Hasil capaian 100% menerangkan bahwa aplikasi yang tersedia mendukung kinerja Pembangunan
- **PENINGKATAN DAN PENURUNAN**
 - a. Perbandingan antara realisasi tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja “Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data” adalah 80% atau sama dengan realisasi tahun 2019 atau dengan kata lain tidak mengalami peningkatan maupun penurunan
 - b. Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2014-2018 sebelumnya.
 - c. Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru

dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan 100% atau sama dengan capaian indikator ini pada tahun 2019.

- ALTERNATIF SOLUSI
 - a. Perlu sosialisasi yang cerdas mengenai sistem sehingga Perangkat Daerah mudah dalam mengaplikasikan dan melakukan penginputan data pada sistem.
 - b. Sistem data yang solid, cepat, dan lengkap dapat mempercepat dan mempermudah penggunaan data terhadap peningkatan pembangunan daerah.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sasaran 3. : Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Indikator Kinerja 3. : Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai Berikut :

1. Program Pengembangan Data Statistik dan Analisis Pembangunan Daerah (Indikator Kinerja : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang digunakan dalam analisis) dengan realisasi 80%
 - (1) Pengembangan Data dan Analisis sektor Pembangunan Daerah dengan hasil Keluaran
 - a. Dokumen Data dan Informasi (Koordinasi Dalam Rangka Inventarisasi Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019)
 - a.1. Pelaksanaan Koordinasi Rapat yang dilaksanakan dalam daerah
 - Forum Sistem Informasi Data Prov. Kaltim (SIDATA) Tahun 2019

Dilaksanakan di kota Balikpapan bertempat di Hotel Blue Sky tanggal 5 Juli 2019 mulai pukul 09.00 wita s/d selesai (terlampir laporan kegiatan)

- Klarifikasi dan Evaluasi keterisian SIDATA Prov. Kaltim tahun 2019

Dilaksanakan pada tanggal 5- 7 November 2019 bertempat di ruang rapat Repetada Bappeda Prov. Kaltim mulai pukul 08.30 wita s/d selesai.

- Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kaltim tahun 2019

a.2. Keikutsertaan Pada Rapat Yang Dilaksanakan Luar Daerah

- Rapat Sosialisasi Permendagri 70/2019 di Jakarta
- Penyusunan Katalog Data Perencanaan bersama Bappenas di Balikpapan
- Penyusunan Metadata Perencanaan bersama Bappenas di Balikpapan

a.3. Penyusunan Buku Pembangunan Kalimantan Timur

(2) Penyelenggaraan data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah.

Dengan hasil Keluaran

- a.1. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan realisasi 25 IGT

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-16
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	%	%	Tingkat efisiensi
			CAPAIAN KINERJA (>100%)	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	100%	95.22%	4.78%

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi Pada Indikator Kinerja Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah efisien senilai 4.78% ($100\% - 95.22\% = 4.78\%$) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya tahun 2019 dikatakan efisien.

Efisiennya sumber daya dikarenakan capaian kinerja adalah 100%. Selain itu Pelaksanaan program terhadap Indikator Kinerja efisien dikarenakan pemutakhiran system data secara berkala dan rutin.

C. REALISASI ANGGARAN

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel III.17
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	43.33%	49.80%	25,606,435,000	25,262,745,049	98.66
2	Terkendalinya sasaran capaian pembangunan daerah	85%	83%	97.65%	5,362,160,000	3,773,641,767	70.37
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	63%	80%	127%	2,021,940,000	1,925,202,167	95.22

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

a. Sasaran Pertama Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen Nasional dan Kabupaten/Kota dimana target kinerja 87% dengan realisasi kinerja 43.33% maka persentase pencapaian kinerja adalah 49.80%.

Pada alokasi anggaran Rp.25,606,435,000,- dengan realisasi Rp.25,262,745,049,- maka persentase capaian anggaran adalah 98.66%.

b. Sasaran Kedua Terkendalnya sasaran capaian pembangunan daerah dimana target kinerja 85% dengan realisasi kinerja 83% maka persentase pencapaian kinerja adalah 97.65%.

Pada alokasi anggaran Rp.5,362,160,000,- dengan realisasi anggaran Rp.3,773,641,767 maka persentase capaian anggaran adalah 70.37%.

c. Sasaran Ketiga Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah dimana target kinerja 63% dengan realisasi kinerja 80% maka persentase pencapaian kinerja 127%. Pada alokasi anggaran Rp.2,021,940,000 dengan realisasi anggaran Rp.1,925,202,167,- maka persentase capaian anggaran adalah 95.22%.

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2019 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.71,292,698,000 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14,178,107,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28,934,660,000,00 Pada perubahan APBD 2018 anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim menjadi Rp.47,458,683,228,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13,703,717,000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13,703,717,000,00.

Tabel III.18
Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15,633,838,000	13,208,405,716	84.49
2	BELANJA LANGSUNG	55,658,860,000	51,846,106,018	93.15
	TOTAL	71,292,698,000	65,054,511,734	91.25

Tabel III.19
Realisasi Anggaran Tahun 2019 per Program/Kegiatan

TUJUAN / SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2019		
1	2	3	4	5	6		7		
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi	77.50%		K	Rp	K	Rp	
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40	8,635,850,000	50.00	8,113,747,625
				a.	Penyusunan RKPD	2	1,973,000,000	2	1,730,020,580
				b.	Penyusunan RPJMD	2	865,000,000	2	807,641,638
				c.	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	3	2,532,000,000	3	2,515,008,612
				d.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	1	960,000,000	1	759,414,855
				e.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	6	919,100,000	6	916,450,700
				f.	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	8	1,386,750,000	8	1,385,211,240
				2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	15	7,169,975,000	27.78	6,819,269,900
				a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	38	5,839,975,000	60	5,544,716,900
				b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30	1,330,000,000	36	1,274,553,000
				3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	60	4,074,900,000	66.11	3,595,317,603
				a.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	1,234,750,000	2	1,161,482,386
				b.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	2	897,000,000	2	794,154,169
				c.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	4	1,943,150,000	4	1,639,681,048
				4	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	50	2,879,900,000	67.47	2,849,758,416
				a.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	820,000,000	2	808,229,062
				b.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2	833,750,000	2	823,673,578
				c.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1	1,226,150,000	1	1,217,855,776

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

				5	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	55	3,351,625,000	50.95	3,316,078,717
				a.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	2	1,390,525,000	2	1,372,167,366
				b.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1	1,256,450,000	1	1,243,632,549
				c.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	1	704,650,000	1	700,278,802
				6	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	78	621,425,000	77.70	568,572,788
				a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10	431,425,000	10	392,546,388
				b.	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	4	190,000,000	4	176,026,400
2	Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	7	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50	3,862,160,000	87.07	3,773,641,767
				a.	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	3	1,928,160,000	3	1,908,603,240
				b.	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPDP	6	1,934,000,000	6	1,865,038,527
				8	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	85	1,500,000,000	0	0
				a.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	2	750,000,000		
				b.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	2	750,000,000		
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	9	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	76	2,021,940,000	85.00	1,925,202,167
				a.	Pengembangan Data dan Analisis Sektorial Pembangunan Daerah	14	1,206,540,000	..18	1,113,656,140
				b.	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	200	815,400,000	240	811,546,027
	PROGRAM PENDUKUNG			10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85	8,549,875,000		7,485,646,066
				a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	69	8,549,875,000	69	7,485,646,066

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019**

				11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	14,118,450,000		13,398,870,968
				a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	147	8,130,671,000	79	7,658,447,100
				b.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	120	5,987,779,000	6	5,740,423,868

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja tahun 2019 yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran dari misi sasaran strategis Bappeda Prov. Kaltim yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diidentifikasi lebih lanjut kedepannya dengan bantuan serta dukungan oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbandingan Indikator Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	87%	43.33%	49.80%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	85%	83%	97.65%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	63%	80%	126.98%

A. REALISASI

1. Realisasi dari Indikator Kinerja “Persentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD” dengan menyangdingkan program pada RPJMD 2018-2023 Prov. Kaltim dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dan diperoleh 26 Program yang sinergis dengan Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019 dari 60 program yang dilaksanakan pada tahun 2019.
2. Realisasi diperoleh dengan menyangdingkan dokumen perencanaan RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan dokumen perencanaan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota, maka diperoleh capaian konsistensi kegiatan antara RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota terhadap RENSTRA/RENJA Perangkat Daerah Prov. Kaltim dengan realisasi sebesar 83% konsistensi Kegiatan.
3. Realisasi indikator kinerja “Persentase capaian pembangunan yang didukung oleh data” di peroleh dengan melakukan perhitungan terhadap Realisasi penggunaan data-data yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya ; SIDATA dengan realisasi 83%; SIPD dengan

realisasi 37% ; TEPPRA dengan realisasi 100%; SIPPD dengan realisasi 100%;
dari data pendukung diperoleh realisasi sebesar 80%.

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan /Penurunan
			2019	Tahun 2019
1	2	3	4	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	43.33%	43.33%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	83%	83.00%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80.00%

Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sama dengan realisasi setiap Indikator Kinerja tahun 2019 atau dengan kata lain tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini dikarenakan karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2014-2018 sebelumnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	%	96%	43.33%	45.14%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	%	100%	83%	83.00%
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	%	80%	80%	100.00%

Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan

1. Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten Kota, memiliki tingkat kemajuan 45.14%.
2. Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, memiliki tingkat kemajuan 83%.
3. Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data, memiliki tingkat kemajuan 100%.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	%	%	Tingkat efisiensi
			CAPAIAN KINERJA (>100%)	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
1	Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana Program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	49.80%	98.66%	-48.85%
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	97.65%	97.71%	-0.06%
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh Data	100%	95.22%	4.78%

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Proporsi rencana Program Pengembangan Daerah Dan Sinergi Antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebesar 48.85%.
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien 0.06%.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja "Persentase Target Kinerja Pembangunan yang didukung oleh data" dimana tingkat efisiensi adalah efisien sebesar 4.78%.



BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 02
Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044